

PEMIKIRAN DALAM PEMBARUAN PEMBELAJARAN PIPS
TUGAS MATA KULIAH PENDIDIKAN IPS SD

Dosen Pengampu:
Dr. Apri Wahyudi, M.Pd



Kelompok 7
Siti Oktaviani (NPM. 2423053016)

MAGISTER KEGURUAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kami kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik mata kuliah Pendidikan IPS SD pada Program Studi Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar. Makalah ini membahas tentang konsep pemikiran dalam pembaruan pembelajaran PIPS. Kami berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan memperluas pemahaman kita mengenai topik yang dibahas.

Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd dan Dr. Apri Wahyudi, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS SD, yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan isi dari makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang pendidikan IPS.

Bandar Lampung, 8 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
II. PEMBAHASAN.....	5
2.1 Sejarah Perkembangan IPS.....	5
2.2 Kedudukan IPS dengan Ilmu-Ilmu Sosial	9
2.3 Hubungan IPS dengan Ilmu-Ilmu Sosial	10
2.4 Ruang Lingkup IPS dan <i>Social Studies Tradition</i>	12
2.5 Eksistensi Pendidikan IPS dan Perannya Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan	14
III. PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan.....	18
3.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) merupakan salah satu bidang studi penting dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, yang bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial untuk menghadapi dinamika masyarakat yang terus berubah. Sejak diperkenalkan, PIPS telah mengalami berbagai perubahan baik dari segi pendekatan, isi, maupun metode pembelajarannya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan masyarakat modern. Pada awalnya, pembelajaran PIPS cenderung bersifat konvensional, berpusat pada guru, dan menekankan pada hafalan materi. Namun, seiring dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan masyarakat menuju era Society 5.0, paradigma pembelajaran PIPS mulai bergeser ke arah yang lebih inovatif, partisipatif, dan kontekstual. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk membekali siswa dengan kompetensi abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta kemampuan memecahkan masalah sosial secara nyata di lingkungan mereka (Baharizqi et al., 2023).

Pembaruan dan perkembangan pembelajaran PIPS tidak lepas dari pemikiran-pemikiran kritis para ahli pendidikan yang menekankan pentingnya pendekatan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah pedagogik kritis, yang menuntut guru untuk tidak hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga mampu membimbing siswa agar sadar terhadap situasi sosialnya dan memperoleh kebebasan dalam belajar (Baharizqi et al., 2023). Guru di era Society 5.0 diharapkan mampu

memfasilitasi pembelajaran yang bermakna, responsif terhadap perubahan, dan mampu memecahkan masalah nyata di masyarakat.

Penelitian-penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa inovasi dalam metode pembelajaran PIPS, seperti penggunaan media permainan edukatif (misalnya ular tangga) dan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran (Dewi et al., 2017; Soleh et al., 2017). Misalnya, penerapan media permainan ular tangga pada materi pembagian wilayah waktu di Indonesia berhasil meningkatkan ketuntasan belajar siswa dari 34,5% menjadi 93,1% setelah tiga siklus pembelajaran (Dewi et al., 2017). Sementara itu, penggunaan model TGT pada materi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa, dari 42% pada siklus pertama menjadi 89% pada siklus ketiga (Soleh et al., 2017).

(Baharizqi et al., 2023) menemukan bahwa guru yang mengadopsi pendekatan pedagogik kritis mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital dan globalisasi.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat relevan untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa, dengan menyesuaikan materi dan metode sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (Wahyudi et al., 2023). Pembaruan pembelajaran PIPS juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh pembaharu pendidikan, seperti KH Ahmad Dahlan, yang menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan agama dan umum serta pengembangan karakter dan pemikiran kritis peserta didik (Mutaali, 2023).

Pemikiran dalam pembaruan pembelajaran PIPS merupakan respons terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan peserta didik di era modern. Pembaruan ini menuntut inovasi dalam metode, media, dan pendekatan pembelajaran, serta menekankan pentingnya pengembangan kompetensi abad 21. Fakta

empiris dari berbagai penelitian dalam sepuluh tahun terakhir memperkuat urgensi pembaruan ini agar PIPS tetap relevan, efektif, dan mampu membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Baharizqi et al., 2023; Dewi et al., 2017; Soleh et al., 2017).

Berdasarkan uraian tersebut penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan pemikiran dalam pembaruan pembelajaran PIPS agar proses pendidikan tidak stagnan dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kajian yang mendalam, para pendidik dan pemangku kepentingan dapat menemukan solusi inovatif yang relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti pemilihan pendekatan yang tepat, pengembangan media pembelajaran yang menarik, serta penyusunan strategi evaluasi yang efektif. Kajian ini juga menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik di era globalisasi. Sehingga, pembelajaran PIPS dapat benar-benar membekali siswa dengan kompetensi, karakter, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah pada kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya pembaruan *social studies* di Amerika Serikat?
2. Bagaimana upaya pembaruan *social studies* di Australia?
3. Bagaimana upaya pembaruan *social studies* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan upaya pembaruan *social studies* di Amerika Serikat

2. Mendeskripsikan upaya pembaruan *social studies* di Australia
3. Mendeskripsikan upaya pembaruan *social studies* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

Penyusunan makalah ini memiliki orientasi agar dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari makalah ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dasar Pendidikan IPS, mencakup sejarah pendidikan IPS, kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan, hubungan IPS dan ilmu-ilmu social, ruang lingkup IPS dan *social studies tradition*, dan eksistensi pendidikan IPS serta perannya dalam mencapai tujuan nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Meningkatkan konsep-konsep dasar IPS secara mendalam, seperti sejarah, ruang lingkup, dan hubungan antar disiplin ilmu yang relevan.
- 2) Menambah wawasan penulis dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengeksplorasi berbagai sumber literatur untuk mendukung argumen ilmiah.
- 3) Penulis menjadi lebih terampil dalam menulis karya akademik dan menyampaikan ide secara terstruktur dan sistematis.

b. Bagi Dosen

- 1) Memperkaya Materi Pembelajaran: Dosen dapat menggunakan temuan dan analisis dalam makalah ini untuk memperkaya materi ajar tentang konsep dasar pendidikan IPS, sehingga materi lebih relevan dan kontekstual bagi mahasiswa.
- 2) Dapat menjadi titik awal bagi dosen untuk mengajak mahasiswa berdiskusi lebih jauh tentang konsep dasar pendidikan IPS.

II. PEMBAHASAN

2.1 Upaya Pembaruan *Social Studies* di Amerika Serikat

Pembaruan yang sedang berlangsung dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat saat ini telah membawa kesadaran baru baik kepada para pendidik maupun masyarakat luas mengenai berbagai kelemahan yang terdapat dalam program pembelajaran *Social Studies*. Berbagai inisiatif reformasi telah didukung oleh Dewan Nasional *Social Studies*, *National Council for the Social Studies* (NCSS) serta organisasi profesional lainnya yang memiliki pengaruh signifikan. Namun, sayangnya, beberapa usaha yang baik ini sering kali terfragmentasi dan cenderung mempersempit ruang lingkup *Social Studies*, akibat tekanan yang fokus pada pengajaran disiplin-disiplin ilmu yang terpisah seperti Sejarah, Geografi, dan Kewarganegaraan, tanpa melakukan analisis yang mendalam mengenai hubungan antar elemen tersebut dalam kurikulum secara keseluruhan.

Memperhatikan kekurangan dalam hubungan yang menyeluruh ini, organisasi pemerintah serta Asosiasi Kesejahteraan Amerika (AHA) bersama dengan NCSS mengambil langkah untuk membentuk sebuah komisi nasional yang bertugas memberikan ide-ide dan saran mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran *Social Studies*. Di samping itu, kedua organisasi ini juga mendirikan Komisi Nasional *Social Studies* yang bertanggung jawab untuk melakukan kajian terhadap isi muatan dan efektivitas dari pembelajaran *Social Studies* di sekolah-sekolah. Komisi tersebut bertugas untuk menetapkan tujuan-tujuan

bagi kurikulum *Social Studies* serta mengembangkan beberapa prioritas yang harus diutamakan.

Pada tahun 1989, komisi yang menangani pelaksanaan kurikulum ini menyebarluaskan hasil temuan mereka kepada masyarakat umum. Beberapa pandangan terkait program *Social Studies* yang komprehensif di abad ke-21 adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum *Social Studies* yang holistik memberikan pengalaman belajar yang konsisten dan bersifat kumulatif, dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah. Pada setiap jenjang pendidikan, siswa diharapkan dapat mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
2. *Social Studies* harus mampu menciptakan hubungan yang jelas antara bidang humaniora dan disiplin ilmu sosial serta ilmu pengetahuan alam. Integrasi dengan disiplin ilmu lain perlu ditingkatkan, jika memungkinkan, untuk membantu siswa memahami keterkaitan antar cabang ilmu pengetahuan.
3. Materi pelajaran dalam *Social Studies* sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai informasi yang perlu dihafal, tetapi juga harus menjadi bahan yang dapat dianalisis dan diperdebatkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kritis.
4. Kegiatan seperti membaca, menulis, mengamati, berdebat, melakukan simulasi pengadilan yang tidak nyata, serta bekerja dengan data statistik dan menerapkan kemampuan berpikir kritis harus menjadi bagian yang integral dalam proses pembelajaran *Social Studies*.

Pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang *Social Studies*, dan mendukung siswa dalam memahami serta mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks yang lebih luas.

Bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang kini ada di Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika Serikat dan dikenal dengan sebutan social studies. Pengenalan social studies ke dalam kurikulum pendidikan formal dimulai di Rugby, Inggris, pada tahun 1827, yang terjadi kurang lebih setengah abad setelah terjadinya Revolusi Industri di abad ke-18, sebuah periode yang ditandai dengan peralihan dari penggunaan tenaga manusia menuju penggunaan tenaga mesin dalam berbagai aktivitas industri. Latar belakang pengenalan social studies dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat memiliki konteks yang berbeda dibandingkan dengan di Inggris, disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan demografis yang berlainan. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai ras, termasuk ras penduduk asli yakni Indian, ras kulit putih yang berasal dari Eropa, serta ras Negro yang dibawa dari Afrika untuk dijadikan tenaga kerja di lahan-lahan perkebunan di negara tersebut.

Pada awalnya, keberagaman ras di Amerika Serikat tidak menimbulkan masalah signifikan. Namun, keadaan tersebut mulai berubah ketika terjadi Perang Saudara antara wilayah utara dan selatan, yang lebih dikenal sebagai Perang Budak, yang berlangsung dari tahun 1861 hingga 1865. Pada saat itu, Amerika Serikat berada dalam proses untuk menjadi kekuatan dominan di dunia, namun mulai muncul tantangan dalam menyatukan penduduk yang berasal dari latar belakang ras yang berbeda-beda. Selain itu, perbedaan dalam hal status sosial ekonomi juga sangat mencolok. Para ahli di bidang kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menciptakan rasa persatuan di antara penduduk yang multiras tersebut agar mereka dapat merasakan identitas sebagai satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum pendidikan di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Kemudian, setelah dilakukan kajian lebih lanjut, pada awal abad ke-20, sebuah Komisi Nasional yang dibentuk oleh *The National Education Association* memberikan rekomendasi untuk memasukkan *social studies* ke dalam kurikulum di semua sekolah dasar dan

sekolah menengah di Amerika Serikat.

Ketika *social studies* pertama kali diperkenalkan, bentuknya merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran, termasuk sejarah, geografi, dan *civics* (kewarganegaraan). Selain sebagai respons dari para ahli Ilmu Sosial terhadap kondisi sosial yang ada di Inggris dan Amerika Serikat, pengenalan *social studies* ke dalam kurikulum pendidikan juga didorong oleh aspirasi dari para pendidik. Hal ini disebabkan oleh keinginan mereka agar setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, para siswa tidak hanya menjadi individu yang berpengetahuan, tetapi juga menjadi warga negara yang baik, yang memahami dan menunaikan hak serta kewajiban mereka. Mereka diharapkan dapat hidup dalam masyarakat dengan seimbang, memperhatikan kepentingan pribadi sekaligus kepentingan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, para siswa tidak perlu menunggu untuk mempelajari Ilmu Sosial di tingkat perguruan tinggi, melainkan mereka sudah dilengkapi dengan materi IPS sejak pendidikan dasar dan menengah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pembaruan dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat saat ini telah mengingatkan para pendidik serta masyarakat umum akan berbagai kelemahan yang ada dalam program pembelajaran *social studies*. Banyak inisiatif pembaruan telah didukung oleh Dewan Nasional *Social Studies*, *The National Council for the Social Studies* (NCSS) serta berbagai kelompok profesional lainnya yang memiliki pengaruh. Akan tetapi, beberapa upaya yang bernilai ini seringkali terpecah-pecah dan cenderung mempersempit cakupan *social studies*, karena tekanan yang diberikan pada pembelajaran disiplin-disiplin ilmu yang terpisah (seperti sejarah, geografi, dan kewarganegaraan) tanpa melihat hubungan yang lebih holistik dengan kurikulum secara keseluruhan. Kurangnya keterkaitan antara berbagai aspek ini memicu badan-badan pemerintah seperti Asosiasi Kesejarahan Amerika (AHA) dan NCSS untuk membentuk Komisi Nasional guna memberikan pemikiran tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran *social studies*.

Kedua organisasi tersebut, bersama dengan organisasi lainnya, mendirikan Komisi Nasional *Social Studies* yang bertugas untuk mengevaluasi isi dan efektivitas pembelajaran social studies serta menetapkan beberapa prioritas yang harus dipegang.

Dari beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional *Social Studies* di Amerika Serikat, terdapat dua fokus utama yang perlu diperhatikan, yaitu perumusan bahan pembelajaran dan strategi pembelajaran untuk social studies. Komisi ini merekomendasikan agar bahan pembelajaran diorganisasikan secara terpadu (*integrated*), tidak hanya di antara disiplin ilmu sosial, tetapi juga mencakup disiplin ilmu sosial, ilmu alam, dan humanitas. Sementara itu, strategi pembelajaran yang diusulkan mencakup pendekatan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Strategi yang diusulkan oleh komisi ini cenderung menekankan perlunya pengembangan strategi pembelajaran atau pendekatan inquiry, mengingat pendekatan ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan belajar.

2.2 Upaya Pembaruan *Social Studies* di Australia

Negara Australia pada mata pelajaran studi sosial merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pentingnya mata pelajaran ini diakui di seluruh negara bagian, karena masyarakat Australia semakin menyadari berbagai isu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, lingkungan, sosial, serta tantangan-tantangan pribadi yang memerlukan keterampilan untuk dapat mengatasinya. Pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia (*the Australian Education Council*) berhasil merumuskan tujuan pendidikan nasional yang kemudian disetujui dalam sebuah konferensi di Hobart dan diberi nama “*The Common and Agreed National Goals for Schooling in Australia*”. Salah satu dari sepuluh tujuan tersebut secara khusus berkaitan dengan studi sosial dan menggarisbawahi pentingnya menciptakan warga negara yang aktif

berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ketujuh, yang berbunyi, “Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dan terinformasi dalam masyarakat demokratis Australia, dengan mempertimbangkan konteks internasional.” (*curriculum corporation*, 1994).

Sebelum tujuan nasional tersebut dirumuskan, tujuan studi sosial di Australia, khususnya di negara bagian Victoria, telah dicantumkan dalam dokumen kurikulum studi sosial tahun 1987. Pada dokumen tersebut dinyatakan, “Program pendidikan sosial harus membuat pemahaman tentang masyarakat mereka sendiri dapat diakses oleh semua siswa, dengan menekankan elemen-elemen yang sama sekaligus mengakui keberagaman. Tujuan utama kedua dari pendidikan sosial adalah untuk memungkinkan siswa berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.” (Ministry of Education, 1989).

Untuk mencapai tujuan kedua ini, pendekatan yang cukup fleksibel dapat dilakukan melalui metode pembelajaran inkuiri. Pendekatan ini secara jelas dinyatakan dalam dokumen (*framework*) yang menyebutkan, “Dua tujuan utama dari pendidikan sosial—mendorong pemahaman tentang masyarakat dan bagaimana cara berpartisipasi secara efektif di dalamnya—dicapai melalui proses inkuiri, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Proses inkuiri terdiri dari strategi pengajaran dan aktivitas pembelajaran yang mendorong penyelidikan sistematis oleh siswa.” (Ministry of Education, 1987:19).

melalui penggunaan pendekatan ini, setiap guru secara langsung menerapkan proses pembelajaran yang aktif, yang berarti bahwa setiap siswa akan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar di dalam kelas (Marsh, 1994). Sejalan dengan karakteristik pembelajaran inkuiri yang dimulai dengan pertanyaan atau berbasis masalah, para siswa akan dihadapkan pada sejumlah pertanyaan yang mendorong rasa ingin tahu mereka untuk mencari informasi sebagai

cara untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Terkait dengan kondisi kelas yang cenderung pasif, pembelajaran yang kurang menarik, dan munculnya rasa bosan di kalangan siswa, penerapan strategi inkuiri oleh guru dapat menjadi solusi yang efektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa untuk menerapkan model pembelajaran inkuiri ini, perlu adanya latihan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, seorang guru tidak dapat mengharapkan kesuksesan langsung hanya melalui satu kali percobaan dengan model atau strategi ini. Berbagai keterampilan guru, seperti kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang menarik perhatian, menyusun pertanyaan yang menantang, dilematis, dan kontroversial, perlu dipertimbangkan dan disiapkan dengan baik.

Strategi yang dikembangkan dalam proses inkuiri yang mendorong siswa untuk belajar secara aktif dapat dilihat pada bagan yang ada. Dengan demikian, penerapan pembelajaran inkuiri tidak hanya mengatasi masalah pembelajaran yang pasif, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masyarakat.



Gambar 1. Keterkaitan Belajar Inkuiri dengan *Social Students*

Proses inkuiri kemudian disusun dalam sebuah model pembelajaran inkuiri yang meliputi delapan tahap pembelajaran. Secara sistematis, tahap-tahap dalam pembelajaran inkuiri ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tuning in* (Menyesuaikan)
- b. *Deciding directions* (Menentukan arah)
- c. *Organizing ourselves* (Mengorganisasi diri)
- d. *Finding out* (Menemukan)
- e. *Sorting out* (Menyortir)
- f. *Drawing conclusions* (Menarik kesimpulan)
- g. *Considering social action* (Mempertimbangkan tindakan sosial)
- h. *Reflection and evaluation* (Refleksi dan evaluasi)

Selanjutnya, dalam kurikulum studi sosial terbaru yang diterapkan di Negara Bagian Victoria, yaitu *Curriculum and Standards Framework* (CSF) mengenai *Studies of Society and Environment* (SOSE) pada tahun 1995, pendekatan inkuiri sebagai strategi pembelajaran dalam studi tetap diakui sebagai metode yang sangat penting. Hal ini terbukti dari pengakuan eksplisit yang tercantum dalam dokumen kurikulum tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan kurikulum yang diterapkan pada tahun 1987, terdapat tiga aktivitas utama yang menjadi bagian dari pendekatan inkuiri, yaitu:

- a. *Investigation* (Investigasi)

Tahap investigasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan penelitian, memproses, serta menginterpretasikan data atau informasi. Kegiatan ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan berbagai alternatif kesimpulan dalam memecahkan masalah, menyusun hipotesis, menetapkan pendekatan yang akan digunakan, serta merancang metode untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan memproses data atau informasi.

- b. *Communication* (Komunikasi)

Tahap komunikasi berfokus pada pengembangan keterampilan siswa dalam menggunakan berbagai bentuk komunikasi, seperti upacara, tulisan, grafik, dan statistik. Dalam tahap ini, siswa belajar untuk mengumpulkan,

memproses, menganalisis, dan menyajikan informasi menggunakan berbagai format serta variasi metode yang ada.

c. *Participation* (Partisipasi)

Tahap partisipasi adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri siswa saat bekerja dalam kelompok serta dalam proses pengambilan keputusan. Siswa juga didorong untuk mengevaluasi sejauh mana keterampilan yang mereka pelajari di kelas dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka serta di masa depan.

Kurikulum ini, tampak bahwa pendekatan inkuiri telah disederhanakan. Dengan mengkaji model yang ditampilkan pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa pendekatan inkuiri ini mengadopsi unsur-unsur pokok dari kurikulum studi sosial tahun 1987, yang dikenal sebagai *Social Education Framework*. Pembaruan pembelajaran IPS mencerminkan respons terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Dari puluhan sumber literatur akademik dan hasil penelitian terbaru yang dianalisis, ditemukan beberapa tema utama yang mendominasi arah pembaruan pembelajaran IPS, yaitu sebagai berikut.

1. Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Salah satu tren utama dalam pembaruan pembelajaran IPS adalah integrasi teknologi. Penelitian oleh Prasetyo (2022), penggunaan alat digital seperti aplikasi pembelajaran dan *platform e-learning* telah meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif. Penelitian ini menemukan bahwa siswa yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran IPS menunjukkan peningkatan motivasi dan pemahaman konsep yang lebih baik.

2. Pendekatan Kontekstual dan Berbasis Masalah

Pendekatan kontekstual dan berbasis masalah semakin banyak diadopsi dalam pembelajaran IPS. Penelitian oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa dapat meningkatkan relevansi dan pemahaman. Metode

ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.

3. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural menjadi fokus penting dalam pembaruan pembelajaran IPS. Studi oleh Sari (2023), pengenalan perspektif multikultural dalam kurikulum IPS membantu siswa memahami keragaman budaya dan meningkatkan toleransi. Penelitian ini menekankan pentingnya materi yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

4. Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) juga semakin populer. Penelitian oleh Setiawan (2022), ditemukan bahwa metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek nyata yang berkaitan dengan isu sosial, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan IPS dalam konteks yang relevan. Hasilnya menunjukkan peningkatan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa.

5. Penerapan Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme, yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, juga menjadi landasan dalam pembaruan pembelajaran IPS. Penelitian oleh Dewi (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan memperdalam pemahaman konsep.

2.3 Upaya Pembaruan Pembelajaran IPS di Indonesia

Ilmu Pembaharuan dalam kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia mulai dikenal sejak diperkenalkannya kurikulum tahun 1975. Pembaharuan dalam proses belajar mengajar IPS adalah sekumpulan fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku serta tindakan manusia dalam upaya membangun diri, masyarakat, bangsa, dan lingkungan, berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa depan. Sebelumnya, istilah yang

digunakan untuk pembelajaran ilmu sosial di tingkat sekolah mengalami perubahan yang signifikan, tergantung pada kondisi politik yang sedang berlangsung pada waktu itu. Beberapa tahap pembaharuan kurikulum IPS di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Kurikulum 1964 memperkenalkan istilah Pendidikan Kemasyarakatan, yang terbagi menjadi dua kelompok mata pelajaran. Kelompok pertama adalah kelompok dasar, mencakup Sejarah Indonesia, Geografi Indonesia, Bahasa Indonesia, dan *Civics*, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok cipta yang meliputi Sejarah Dunia dan Geografi Dunia. Kemudian, kedua kelompok ini diintegrasikan menjadi Pendidikan Kewargaan Negara, yang menghubungkan ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan.
- b) Pada tahun 1968, terdapat perubahan dalam pengelompokan mata pelajaran sebagai respons terhadap perubahan orientasi pendidikan. Dalam hal ini, mata pelajaran di sekolah dikelompokkan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus.
- c) Kurikulum 1975, yang diperkenalkan pada tahun itu mengelompokkan pendidikan menjadi tiga kategori: pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum ini, istilah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dinyatakan secara jelas sebagai perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan diatur sebagai mata pelajaran tersendiri yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam konteks ini, IPS termasuk dalam kelompok pendidikan akademis, sedangkan PMP berada dalam kelompok pendidikan umum. Namun, IPS sebagai pendidikan akademis memiliki misi untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, mata pelajaran IPS diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan PMP.

- d) Sebelum adanya pembaruan pada Kurikulum 1975, pada tahun 1980 muncul bidang studi PSPB, yang merupakan gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Mata pelajaran ini mirip dengan IPS, Sejarah, dan PMP. Upaya perbaikan terhadap Kurikulum IPS 1975 baru terwujud pada tahun 1984.
- e) Kurikulum IPS 1984 pada dasarnya dirancang untuk menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Kurikulum 1975. Berdasarkan segi pendekatan pembelajaran, baik Kurikulum IPS 1975 maupun 1984 menerapkan pendekatan integratif dan struktural untuk pendidikan IPS di tingkat SMP, sedangkan untuk SMA menggunakan pendekatan disiplin terpisah. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan dalam IPS untuk Sekolah Dasar (SD) lebih menyerupai pendekatan integratif.
- f) Pada tahun 1994, kurikulum IPS kembali mengalami perubahan. Dalam Kurikulum 1994, IPS dijelaskan sebagai mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial dengan dasar kajian dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Untuk IPS di tingkat SD, bahan kajian utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan sosial dan sejarah. Pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan, sedangkan kajian sejarah mencakup perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lalu hingga saat ini. Ada perbedaan yang cukup signifikan dalam Kurikulum IPS Sekolah Dasar 1994 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, terutama dalam metode dan penilaian. Kurikulum IPS 1994 hanya memberikan anjuran umum bahwa proses belajar mengajar seharusnya melibatkan prinsip belajar aktif. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa kurikulum ini memberikan otonomi yang cukup besar kepada guru.

- g) Memasuki abad ke-21, yang ditandai dengan perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi, telah memicu perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2003, disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang membawa dampak signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintah kembali melakukan reformasi kurikulum yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum IPS diusulkan untuk diubah menjadi Pengetahuan Sosial, dengan tujuan untuk merespons berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara positif. Langkah ini diambil untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran Pengetahuan Sosial dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- h) Terkait dengan implikasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, dikeluarkan kebijakan mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta pedomannya, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dipandu oleh KTSP yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam KTSP tahun 2006, terdapat pemisahan antara IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pemisahan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai masukan dan kritik dari para ahli pendidikan serta kepentingan pendidikan nasional dan politik bangsa, yang menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Meskipun IPS dan PKn memiliki tujuan dan kajian yang serupa dalam membentuk warganegara yang baik, PKn tetap diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah di sekolah.

Kendala dalam Pembaharuan Pendidikan IPS di Indonesia. Namun, pelaksanaan pembelajaran IPS ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Terdapat

beberapa kendala yang menyebabkan pembelajaran IPS kurang berhasil bahkan cenderung membosankan, di antaranya.

- a. Banyak guru IPS yang belum terampil dalam menggunakan berbagai model pengajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
- b. Ketersediaan alat dan bahan pembelajaran di banyak sekolah berpengaruh terhadap proses pembelajaran IPS.
- c. Proses belajar mengajar IPS masih cenderung dilakukan dengan pendekatan konvensional, sehingga peserta didik hanya mendapatkan hasil faktual tanpa mengalami proses belajar yang mendalam.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran dalam pembaruan pembelajaran PIPS dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pembaruan Social Studies di Amerika Serikat menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang terintegrasi, tidak hanya antara disiplin ilmu sosial, tetapi juga dengan humaniora dan ilmu alam. Upaya pembaruan didorong oleh organisasi profesional seperti NCSS dan AHA, yang merekomendasikan strategi pembelajaran berbasis inquiry untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan siswa.
2. Pembaruan *Social Studies* di Australia berfokus pada penerapan pendekatan pembelajaran inkuiri (*inquiry-based learning*) yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum di Australia menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan siswa berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dalam masyarakat demokratis.
3. Pembaruan *Social Studies* di Indonesia mengalami berbagai perubahan kurikulum sejak tahun 1964 hingga saat ini, dengan penekanan pada integrasi beberapa disiplin ilmu sosial untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa sebagai warga negara yang baik. Pelaksanaan pembaruan IPS di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif, minimnya fasilitas pembelajaran, dan dominasi pendekatan konvensional yang membuat pembelajaran kurang menarik dan bermakna bagi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Eska. P. 2023. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Klaten: Lakeisha.
- Baharizqi, S., Muhtar, T., Herlambang, Y. T., & Fahrozy, F. (2023). Elementary School Journal Jurnal Kajian Pendidikan Dasar Kompetensi Pedagogik Di Era Society 5.0: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Pedagogik Kritis. *Elementary School Journal*, 13(1), 2407–4937.
<https://doi.org/10.24114/esjpsd.v11i4.46286>
- Dewi, T. L., Kurnia, D., & Panjaitan, R. L. (2017). Penggunaan Media Permainan Ular Tangga Pada Pembelajaran PIPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pembagian Wilayah Waktu di Indonesia. *Jurnal Pena Ilmiah*, 2(1), 2091–2100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpi.v2i1.12425>
- Mutaali, A. (2023). Pemikiran dan Gagasan Pembaharuan KH Ahmad Dahlan. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v1i1.7>
- Soleh, M., Dadang, K., & Sunarya, D. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Pada Pembelajaran PIPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sumer Daya Alam dan Kegiatan Ekonomi. *Jurnal Pena Ilmiah*, 2(1), 2101–2110.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpi.v2i1.12416>
- Wahyudi, S. A., Siddik, M., & Suhartini, E. (2023). Analisis Pembelajaran IPAS dengan Penerapan Pendekatan Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka. *JURNAL PENDIDIKAN MIPA*, 13(4), 1105–1113.
<https://doi.org/10.37630/jpm.v13i4.1296>